

**PENERAPAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)
DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN PADA KINERJA
AKADEMIK DI FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh :

IKHMAN ALHAKKI
NPM. 2323012012



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN PADA KINERJA AKADEMIK DI FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

IKHMAN ALHAKKI

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan prinsip Good University Governance (GUG) dalam manajemen pendidikan serta dampaknya terhadap kinerja akademik di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan utama yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Koordinator Bagian Tata Usaha, dan Koordinator Sub Bagian Akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GUG seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan telah diupayakan dalam berbagai aspek manajemen pendidikan, termasuk perencanaan akademik, pengelolaan administrasi, dan peningkatan kualitas layanan. Implementasi GUG berkontribusi pada peningkatan efisiensi manajemen akademik serta memberikan dampak positif terhadap kinerja dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Meskipun demikian, ditemukan beberapa tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur, dan kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pentingnya strategi berkelanjutan untuk mengoptimalkan penerapan GUG melalui penguatan budaya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas kepemimpinan akademik, yang diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan tata kelola pendidikan tinggi yang lebih baik dan mendorong peningkatan mutu akademik secara menyeluruh.

Kata Kunci: *good university governance*, manajemen pendidikan, kinerja akademik, pendidikan tinggi, FMIPA Unila

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) IN EDUCATIONAL MANAGEMENT ON ACADEMIC PERFORMANCE AT FMIPA UNIVERSITY OF LAMPUNG

by

IKHMAN ALHAKKI

This study aims to describe and analyze the implementation of Good University Governance (GUG) principles in educational management and its impact on academic performance at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FMIPA) of the University of Lampung. Using a qualitative approach and case study method, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies of key informants consisting of the Dean, Vice Dean for Academic Affairs, Coordinator of the Administration Section, and Coordinator of the Academic Sub-Section. The results of the study indicate that GUG principles such as transparency, accountability, participation, effectiveness, and fairness have been pursued in various aspects of educational management, including academic planning, administrative management, and improving service quality. The implementation of GUG contributes to increasing the efficiency of academic management and has a positive impact on the performance of lecturers, students, and education personnel. However, several challenges were found such as resistance to change, limited infrastructure, and the need to improve human resource competencies. Therefore, this study suggests the importance of a sustainable strategy to optimize the implementation of GUG through strengthening organizational culture, utilizing information technology, and increasing academic leadership capacity, which is expected to be a reference in developing better higher education governance and encouraging improvements in academic quality as a whole.

Keywords: good university governance, educational management, academic performance, higher education, FMIPA Unila.

**PENERAPAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)
DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN PADA KINERJA
AKADEMIK DI FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG**

Oleh :

IKHMAN ALHAKKI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER PENDIDIKAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Administrasi Pendidikan
Jurusan Ilmu Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis : PENERAPAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN PADA KINERJA AKADEMIK DI FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG

Nama Mahasiswa : IKHMAN ALHAKKI

Nomor Pokok Mahasiswa : 2323012012

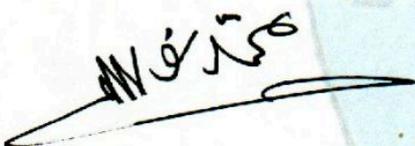
Program Studi : Magister Administrasi Pendidikan (S-2)

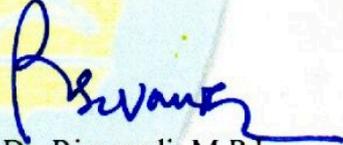
Jurusan : Ilmu Pendidikan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

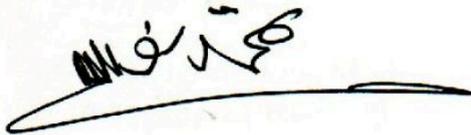
1. Komisi Pembimbing,


Dr. Muhammad Nurwahidin., M.Ag., M.Si.
NIP. 197412202009121002


Dr. Riswandi, M.Pd.
NIP. 197608082009121001

2. Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan,


Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Ag., M.Si.
NIP. 197412202009121002

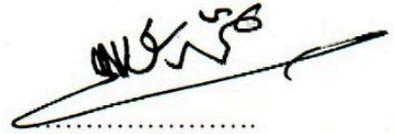
Ketua Program Studi Magister
Administrasi Pendidikan,


Hasan Hariri, S.Pd., MBA, Ph.D.
NIP. 196705212000121001

PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Ag., M.Si.
NIP. 196007251984032002



Sekretaris : Dr. Riswandi, M.Pd.
NIP. 197608082009121001



Anggota : Hasan Hariri, S.Pd., MBA, Ph.D
NIP. 196705212000121001



: Dr. Sulton Djasmi, M.Pd.
NIK 241708520504101



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198705042014041001



3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001



4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: **26** Mei 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Penerapan Good University Governance (GUG) Dalam Manajemen Pendidikan Pada Kinerja Akademik Di FMIPA Universitas Lampung” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila jika di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Ikhman Alhakki
NPM 2323012012

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 28 Desember 1971, sebagai anak pertama dari enam bersaudara pasangan Bapak Aliyoen Abdurroni Malian, B.Sc. (Menggala, Lampung) dan Ibu Nurhayati binti Sarbini (Way Kanan, Lampung).

Menempuh pendidikan pra-sekolah di Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Teladan Trisula 1 Tanjungkarang Kotamadya Bandar Lampung. Dilanjutkan pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 22 dan mengalami perubahan nama menjadi SDN 3 Rawa Laut Tanjungkarang Kotamadya Bandar Lampung. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tanjungkarang Kotamadya Bandar Lampung, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tanjungkarang Kotamadya Bandar Lampung.

Tahun 1993, penulis tercatat sebagai mahasiswa Program Diploma 3 Koperasi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Gelar Sarjana Ekonomi diraih pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

Pada 2023, penulis tercatat sebagai Mahasiswa Pascasarjana pada Program Magister Administrasi Pendidikan (MAP), Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penerapan Good University Governance (GUG) Dalam Manajemen Pendidikan Pada Kinerja Akademik Di FMIPA Universitas Lampung” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Administrasi Pendidikan.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam proses penelitian ini;
2. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan FKIP Universitas Lampung, atas bantuan administrasi dalam penyelesaian penelitian ini;
3. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini;
4. Bapak Dr. Muhammad Nurwahidin., M.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I (pembimbing pengganti/lanjutan) dan sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unila, yang telah melakukan pembimbingan dan pengarahan atas penyelesaian penelitian ini;
5. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Universitas Lampung yang telah melakukan pembimbingan dan pengarahan atas penyelesaian penelitian ini;
6. Bapak Hasan Hariri, M.B.A., Ph.D selaku Dosen Pembahas sekaligus Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan yang telah melakukan pembimbingan dan pengarahan atas penyelesaian penelitian ini;
7. Dekan FMIPA Universitas Lampung, atas kerelaan waktu dan kontribusi dalam wawancara serta penyediaan data yang diperlukan;
8. Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA Universitas Lampung atas kerelaan waktu dan kontribusi dalam wawancara serta penyediaan data yang diperlukan;
9. Koordinator Bagian Tata Usaha FMIPA Unila, yang telah banyak memberikan informasi penting dalam pelaksanaan penelitian ini;
10. Koordinator Sub Bagian Akademik FMIPA Unila, yang telah banyak memberikan informasi penting dalam pelaksanaan penelitian ini.

11. Dosen pengajar dan para dosen FKIP Unila atas bimbingan, masukan, dan motivasi yang tak ternilai dalam proses perkuliahan dan penulisan tesis ini.
12. Keluarga, sahabat, dan rekan mahasiswa se-Angkatan 2023 yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat selama masa studi hingga tesis ini terselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola pendidikan tinggi, khususnya dalam penerapan prinsip Good University Governance guna meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan dan kinerja akademik. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan guna mengungkap fenomena-fenomena yang ada di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas manajemen pendidikan tinggi di Indonesia.

Bandar Lampung, Mei 2025
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Sub Fokus Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat/Implikasi Penelitian	7
1.5.1 Manfaat Teoritis	7
1.5.2 Manfaat Praktis	7
1.6 Definisi Istilah	9
1.6.1 Istilah Manajemen	9
1.6.2 Istilah Pendidikan	11
1.6.3 Istilah Umum	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	12
2.2 Konsep <i>Good University Governance</i> (GUG)	14
2.3 Fungsi Prinsip-Prinsip <i>Good University Governance</i> (GUG)	15
2.4 Manajemen dalam Pendidikan	17
2.5 Manajemen Publik	21
2.6 Badan Layanan Umum	24
2.7 Kinerja dan Mutu Akademik	25
2.8 Aspek Penting dalam Teori Manajemen Operasional	27
2.8.1 Definisi Manajemen Operasional	27
2.8.2 Fungsi Utama dalam Manajemen Operasional	27
2.8.3 Konsep Utama dalam Manajemen Operasional	28
2.8.4 Elemen Kunci dalam Manajemen Operasional	29
2.8.5 Perkembangan Teori Manajemen Operasional	29
2.8.6 Pentingnya Manajemen Operasional	30
2.8.7 Manajemen Proses Operasional	30
2.8.8 Menyusun atau Menyempurnakan SOP	30
2.8.9 Mengukur Keberhasilan dalam Mencapai Tujuan Tata Kelola yang Baik	31
2.8.9.1 Indikator Kinerja Utama	31
2.8.9.2 <i>Key Performance Indicators</i> (KPI)	33
	iii

2.8.9.3	Perbedaan IKU dengan KPI	34
2.9	Penelitian Kualitatif Deskriptif	36
2.9.1	Sumber Data	37
2.9.2	Reduksi Data	38
2.9.3	Penyajian Data	38
2.9.4	Penarikan Simpulan	38
III.	METODE PENELITIAN	40
3.1	Setting Penelitian	40
3.1.1	Lokasi dan Tempat Penelitian	40
3.1.2	Waktu Penelitian	40
3.2	Jenis dan Rancangan Penelitian	40
3.3	Kehadiran Peneliti	41
3.4	Teknik Pengumpulan Data Penelitian	41
3.4.1	Sumber data	41
3.4.2	Teknik Pengumpulan Data	43
3.4.2.1	Wawancara	43
3.4.2.2	Observasi	44
3.4.2.3	Studi dokumen	45
3.5	Teknik Analisis Data Penelitian	47
3.5.1	Reduksi Data (<i>Data reduction</i>)	47
3.5.2	Penyajian Data (<i>Data display</i>)	47
3.5.3	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	47
3.6	Uji Keabsahan Data	48
IV.	HASIL PENELITIAN	49
4.1	Paparan Data Penelitian	50
4.1.1	Penerapan Prinsip GUG dalam Pengelolaan Akademik	50
4.1.1.1	Prinsip Transparansi	50
4.1.1.2	Prinsip Akuntabilitas	53
4.1.1.3	Prinsip Partisipasi	55
4.1.1.4	Prinsip Efisiensi	59
4.1.1.5	Prinsip Efektivitas	60
4.1.1.6	Prinsip Keadilan	62
4.1.2	Kontribusi GUG Terhadap Manajemen Pendidikan	64
4.1.2.1	Efektivitas Perencanaan	65
4.1.2.2	Efektivitas Pelaksanaan	66
4.1.3	Pengaruh Penerapan GUG terhadap Kinerja Akademik	67
4.1.4	Pengungkapan Kendala atau Hambatan Penerapan Prinsip GUG	70
4.1.5	Strategi Memperkuat Penerapan GUG melalui Manajemen Pendidikan Tinggi	72
4.2	Temuan Penelitian	75
4.2.1	Penerapan Prinsip GUG dalam Pengelolaan Akademik	75
4.2.1.1	Prinsip Transparansi	75
4.2.1.2	Prinsip Akuntabilitas	76
4.2.1.3	Prinsip Partisipasi	78
4.2.1.4	Prinsip Efisiensi	78

4.2.1.5 Prinsip Efektivitas	79
4.2.1.6 Prinsip Keadilan	79
4.2.2 Efektivitas Manajemen Pendidikan di FMIPA Unila	80
4.2.3 Dampak terhadap Kinerja Akademik di FMIPA Unila	81
4.2.4 Tantangan dalam Penerapan GUG	83
4.2.5 Strategi Peningkatan Penerapan GUG	86
V. KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan	91
5.1.1 Penerapan Prinsip GUG dalam Pengelolaan Akademik	91
5.1.2 Efektivitas Manajemen Pendidikan di FMIPA Unila	92
5.1.3 Dampak terhadap Kinerja Akademik di FMIPA Unila	93
5.1.4 Tantangan dalam Penerapan GUG	93
5.1.5 Strategi Peningkatan Penerapan GUG	93
5.2 Saran	94
Daftar Pustaka	96
Lampiran	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> menurut United Nations Development Programme (UNDP)	13
3.1 Informan Penelitian	42
3.2 Kode Penelitian	42
3.3 Pedoman Studi Dokumen	46
4.1 Rata-Rata Indeks Prestasi Kumulatif, Rata-Rata Nilai EPT, Rata-Rata Masa Studi (Tahun) FMIPA Unila Tahun 2024	69
4.2 Jumlah Penelitian Dosen FMIPA Unila Berdasarkan Pendanaan Tahun 2022-2024	69
4.3 Matriks Hasil Penelitian	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif	39
4.1 Struktur Organisasi Universitas Lampung	48
4.2 Diagram Konteks Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Pendidikan	77
4.3 Diagram Konteks Efektivitas Pengelolaan Akademik	81
4.4 Diagram Konteks Dampak terhadap Kinerja Akademik	83
4.5 Diagram Konteks Tantangan dalam Implementasi GUG	85
4.6 Diagram Konteks Strategi Peningkatan Implementasi GUG	87
4.7 Diagram Konteks Hubungan antara Prinsip <i>Good University Governance</i> (GUG), Manajemen Pendidikan, dan Kinerja Akademik	89

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi sumber daya manusia jangka panjang yang memunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia dilakukan melalui pendidikan. Kemajuan pembangunan suatu negara tergantung pada sejauh mana kualitas dan jangkauan pendidikan itu diterapkan. Jika pendidikan suatu negara mengalami kemajuan maka pembangunan negara dapat mengalami kemajuan dan sebaliknya, sehingga dapat mengubah berbagai aspek kehidupan terutama dalam proses pembangunan.

Proses pendidikan tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan. Pembangunan dilaksanakan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan manusia yang berkualitas dapat dilihat dari strata pendidikannya.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi keputusan KTT Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendeklarasikan *Millenium Development Goals* (MDGs) melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Iskandar, 2020).

Huruf b agenda pembangunan global pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target yang saling terkait, menyatakan bahwa menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.

Pemerintah terus berusaha memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan, khususnya kualitas pendidikan agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Dengan demikian negara mampu bersaing dalam dunia global. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Barneett (1992) menyatakan tentang empat konsep dominan pendidikan tinggi dengan pendekatan kontemporer dan kualitas adalah :

- a. Pendidikan tinggi sebagai penghasil tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Pendidikan tinggi sebagai pelatihan untuk karir penelitian.
- c. Pendidikan tinggi sebagai pengelolaan penyediaan pengajaran yang efisien.
- d. Pendidikan tinggi sebagai upaya memperluas kesempatan hidup.

Terdapat empat tujuan intrinsik (yang tidak dapat ditinggalkan) dalam institusi pendidikan tinggi, yaitu :

- a. Kepedulian terhadap pengembangan kemandirian, kemampuan kritis diri, dan kompetensi akademik setiap siswa. Bukti disini mencakup keterampilan intelektual tingkat tinggi seperti mengidentifikasi masalah, menyusun bukti, melihat hubungan dan membuat penilaian tentatif;
- b. Lembaga mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, mengambil tanggung jawab institusi untuk memelihara dan meningkatkan standarnya sendiri serta pengembangannya di masa depan; kehidupan internal akan mendorong komunitas akademis yang kritis terhadap diri sendiri dan belajar mandiri, berdasarkan pemahaman umum tentang institusi;
- c. Lembaga yang menjadikan kehidupan penelitian penting dalam arti 'budaya wacana kritis'; yaitu, penyelidikan kritis dan kolaboratif di antara anggota staf

(penelitian ini tidak selalu memerlukan dana penelitian yang besar atau peralatan modal yang besar).

- d. Kepedulian untuk membuat bentuk pendidikan tinggi ini (yang pada dasarnya merupakan bentuk penyelidikan kritis kolaboratif antara staf dan mahasiswa) tersedia bagi semua orang yang dapat memperoleh manfaat darinya dan yang ingin memiliki akses terhadapnya.

Perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia menuntut tata kelola yang semakin baik dan akuntabel. Dalam konteks globalisasi dan persaingan internasional, universitas tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang berkualitas, tetapi juga menjalankan fungsi tridarma perguruan tinggi secara optimal. Oleh karena itu, prinsip *Good University Governance* (GUG) menjadi acuan penting dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang profesional dan berdaya saing. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi harus terimplementasi secara menyeluruh dalam sistem akademik dan kelembagaan universitas.

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Lampung yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola akademik. Dalam beberapa tahun terakhir, FMIPA telah mengupayakan berbagai pembenahan melalui perbaikan sistem administrasi akademik, peningkatan layanan pendidikan, penguatan peran dosen dan tenaga kependidikan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses akademik. Namun demikian, dinamika implementasi prinsip GUG dalam manajemen pendidikan di fakultas ini masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup sistem pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya partisipatif, keterbatasan informasi yang mudah diakses oleh sivitas akademika, serta perlunya penguatan evaluasi dan pengawasan internal.

Lebih lanjut, implementasi GUG diyakini memiliki dampak terhadap kinerja akademik, baik dari sisi dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan. Kinerja akademik tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga sangat

dipengaruhi oleh sistem dan budaya tata kelola yang diterapkan di lingkungan institusi. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip GUG di FMIPA Universitas Lampung dapat meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan serta berdampak pada kinerja akademik secara keseluruhan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan informasi yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk implementasi GUG, kendala yang dihadapi, dampak terhadap proses dan hasil akademik, serta strategi penguatan tata kelola pendidikan di FMIPA Universitas Lampung, terutama dalam upaya peningkatan mutu akademik dan kesiapan menuju perguruan tinggi yang mandiri dan profesional.

Prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG) berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan perguruan tinggi berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan mutu akademik dan daya saing global. Prinsip-prinsip GUG merupakan parameter strategis dan ilmiah untuk memahami peningkatan kualitas pendidikan dan kinerja akademik. Berbagai tantangan seperti koordinasi antar unit kerja akademik, efektivitas kebijakan, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi GUG dalam manajemen pendidikan di FMIPA Universitas Lampung dan dampaknya terhadap kinerja akademik dengan faktor-faktor berupa rasio mahasiswa-dosen, kualitas pengajaran, waktu tempuh studi dan kepuasan mahasiswa.

Evaluasi kinerja akademik di perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu, mengawasi, serta mengendalikan perguruan tinggi agar tetap berjalan sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti, 2016). Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu melaksanakan evaluasi kinerja akademik untuk memperoleh informasi dan masukan tentang sejauh mana kinerja akademik

dan kemungkinan terjadinya kelemahan dan atau bahkan pelanggaran dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi (Thalib dkk. 2018)

Good University Governance (GUG) memiliki makna bahwa perguruan tinggi berfokus pada tujuan organisasi dan hasil bagi masyarakat dan pengguna jasa dengan melaksanakan fungsi dan peran secara jelas dan efektif. Selain itu, perguruan tinggi juga mempromosikan nilai-nilai seluruh organisasi dengan memperoleh informasi; mengambil keputusan, dan mengelola risiko secara transparan. Perguruan tinggi juga dituntut untuk mengembangkan kompetensi dan kapasitas kepada seluruh pengelola universitas secara efektif dan melibatkan seluruh *stakeholder* dan menciptakan akuntabilitas secara nyata (Slamet 2014).

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada implementasi prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG) dalam pengelolaan manajemen pendidikan serta pengaruhnya terhadap kinerja akademik di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung. GUG merupakan kerangka tata kelola universitas yang menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana prinsip-prinsip GUG diterapkan di FMIPA, bagaimana pelaksanaannya memengaruhi sistem manajemen pendidikan, serta dampaknya terhadap kualitas kinerja akademik civitas akademika, khususnya dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

Dalam praktiknya, manajemen pendidikan yang baik menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi fakultas serta peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Namun, dalam implementasi GUG, sering kali dihadapi berbagai kendala mulai dari aspek kepemimpinan, sistem informasi manajemen, partisipasi pemangku kepentingan, hingga efektivitas pengawasan dan evaluasi akademik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang baik telah diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dikembangkan

untuk meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan di lingkungan FMIPA Universitas Lampung.

1.3 Sub Fokus Penelitian

Untuk memperjelas arah kajian, fokus tersebut dijabarkan ke dalam beberapa subfokus, yaitu:

- a. Mengkaji bagaimana prinsip-prinsip GUG seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan diimplementasikan dalam kegiatan akademik di FMIPA Universitas Lampung.
- b. Menjelaskan sejauh mana prinsip GUG mampu meningkatkan: efektivitas perencanaan; pelaksanaan; dan evaluasi manajemen pendidikan.
- c. Mengidentifikasi pengaruh penerapan GUG terhadap peningkatan kinerja akademik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- d. Mengungkap kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip GUG di lingkungan fakultas.
- e. Merumuskan strategi atau langkah-langkah untuk memperkuat penerapan GUG dalam rangka meningkatkan mutu manajemen pendidikan dan kinerja akademik secara berkelanjutan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG) terhadap manajemen pendidikan serta dampaknya pada kinerja akademik di FMIPA Universitas Lampung. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *Good University Governance* diterapkan dalam pengelolaan akademik di FMIPA Universitas Lampung.
- b. Mengkaji sejauh mana implementasi GUG berkontribusi terhadap efektivitas manajemen pendidikan di lingkungan fakultas.
- c. Menjelaskan dampak penerapan GUG terhadap kinerja akademik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di FMIPA.

- d. Mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi GUG dalam manajemen pendidikan di FMIPA Universitas Lampung.
- e. Merumuskan strategi peningkatan implementasi GUG guna memperkuat manajemen pendidikan dan meningkatkan kinerja akademik di FMIPA Universitas Lampung.

1.5 Manfaat/Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan manajemen pendidikan berbasis Good University Governance (GUG) di perguruan tinggi, khususnya di FMIPA Universitas Lampung.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu manajemen pendidikan tinggi, khususnya yang berkaitan dengan implementasi *Good University Governance* (GUG). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik tentang hubungan antara prinsip tata kelola universitas yang baik dengan peningkatan kinerja akademik di lingkungan pendidikan tinggi.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang dapat diterapkan dalam peningkatan tata kelola akademik di FMIPA Universitas Lampung. Implementasi *Good University Governance* (GUG) terhadap manajemen pendidikan berdampak langsung pada peningkatan kinerja akademik. Berikut adalah manfaat praktis yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak:

- a. Bagi Pimpinan Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan)

Dekan FMIPA Universitas Lampung dan Wakil Dekan Bidang Akademik memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi Good University Governance (GUG) dalam manajemen pendidikan. Pemahaman ini dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan berbasis

data guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola akademik. Selain itu, penerapan GUG yang lebih optimal juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan akademik serta efektivitas kebijakan akademik yang diterapkan di fakultas.

b. Bagi Tenaga Kependidikan (Koordinator Tata Usaha dan Sub Bagian Akademik)

Koordinator Bagian Tata Usaha, Koordinator Sub Bagian Akademik, dan Staf Administrasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi akademik melalui sistem tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, perbaikan dalam tata kelola ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan akademik bagi dosen dan mahasiswa. Dengan sistem yang lebih baik, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi perbaikan dalam pengelolaan akademik yang selaras dengan prinsip Good University Governance (GUG).

c. Bagi Dosen

Seluruh dosen di FMIPA Universitas Lampung dapat memperoleh akses terhadap kebijakan akademik yang lebih transparan dan sistematis. Selain itu, peningkatan tata kelola akademik yang lebih baik juga mendukung pengembangan kompetensi dosen. Hal ini berdampak pada meningkatnya efektivitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yang mencakup pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

d. Bagi Mahasiswa

Seluruh mahasiswa FMIPA Universitas Lampung mendapatkan sistem pendidikan yang lebih terstruktur dan transparan, terutama dalam layanan akademik, perkuliahan, dan evaluasi akademik. Selain itu, mereka juga memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas serta layanan akademik yang berkualitas. Dengan sistem pendidikan yang lebih efektif dan berbasis prinsip Good University Governance (GUG), mahasiswa didukung dalam pengembangan prestasi akademik yang lebih optimal.

e. Bagi Universitas Lampung secara keseluruhan

Pimpinan Universitas Lampung dan seluruh fakultas di lingkungan Universitas Lampung memperoleh manfaat dalam meningkatkan citra institusi sebagai perguruan tinggi yang menerapkan prinsip tata kelola universitas yang baik. Selain itu, implementasi Good University Governance (GUG) di FMIPA dapat menjadi referensi bagi fakultas lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Lebih lanjut, penerapan GUG yang efektif turut mendukung kesiapan institusi dalam menuju status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dengan sistem manajemen pendidikan yang lebih mandiri dan profesional.

Dengan penerapan Good University Governance (GUG) yang optimal, diharapkan FMIPA Universitas Lampung dapat meningkatkan manajemen pendidikan dan kinerja akademik, sehingga berdampak positif bagi seluruh stakeholder di lingkungan universitas.

1.6 Definisi Istilah

1.6.1 Istilah Manajemen

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Manajemen merupakan proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas manajerial itu dilakukan oleh para manajer sehingga dapat mendorong sumber daya personil bekerja memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi yang disepakati bersama dapat tercapai. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen. Karena itu di dalamnya ada sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu: unsur manusia (*men*), barang-barang (*materials*), mesin (*machines*), metode (*methods*), uang (*money*) dan pasar atau (*market*). Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau memengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien

- b. *Governance* merupakan pergeseran makna dari *government*. Dalam *government*, negara menjadi aktor tunggal yang mengatur segala aspek kehidupan. Sementara dalam *governance* negara hanya berperan sebagai regulator dan administrator. *Governance* bisa dikatakan baik atau *good* apabila sumber daya dan masalah yang dihadapi publik dikelola secara efektif dan efisien. *Governance* itu sendiri adalah bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor. Definisi umum tata kelola mengacu pada distribusi wewenang dan fungsi antara unit-unit dalam entitas yang lebih besar, cara komunikasi dan pengendalian di antara unit-unit tersebut, dan perilaku hubungan antara entitas dan lingkungan sekitarnya. Landasan konvensional tata kelola di dalam universitas adalah para pengurusnya, administrasi eksekutif, fakultas, serta kelompok dan unit lain, seperti pemerintahan mahasiswa dan alumni.
- c. *Good Governance* adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. *Good Governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah pokok atau prinsip umum pemerintahan yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- d. *Good University Governance* (GUG) merupakan penerapan prinsip dasar dalam konsep *good governance* pada sistem dan proses *governance* pada institusi perguruan tinggi, dengan berbagai penyesuaian pada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum.
- e. Kinerja akademik adalah prestasi akademik mahasiswa, termasuk IPK, persentase lulus tepat waktu dan lain-lain.
- f. Transparansi, yaitu kejelasan dan terbuka dalam pengelolaan.
- g. Akuntabilitas; yaitu pertanggungjawaban dalam pengelolaan.
- h. Partisipasi; yaitu keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan.
- i. Keadilan; yaitu kesetaraan dan keadilan dalam pengelolaan.

1.6.2 Istilah Pendidikan

- a. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) adalah institusi didalam universitas atau perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau yang dikenal dengan istilah tri dharma perguruan tinggi.
- b. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Dosen adalah tenaga pengajar di perguruan tinggi.
- d. Mahasiswa adalah individu yang mengikuti dan melaksanakan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi.

1.6.3 Istilah umum

- a. Evaluasi, yaitu proses penilaian dan analisis.
- b. Implementasi adalah proses penerapan konsep atau kebijakan.
- c. Analisis adalah proses penguraian data untuk mendapatkan kesimpulan.
- d. *Stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perguruan tinggi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian *Good Governance*

Konsep tata kelola telah menerima berbagai definisi tergantung pada penulis dan konteksnya.¹ Menurut Pusat Tata Kelola yang Baik dari Jaringan Akuntabilitas Sosial yang Berafiliasi - usaha patungan antara Bank Dunia dan Dewan Penelitian Ilmu Pengetahuan Manusia - "tata kelola secara luas mengacu pada bagaimana kekuasaan dijalankan melalui lembaga ekonomi, sosial, dan politik suatu negara untuk menggunakan sumber daya negara tersebut untuk pembangunan sosial-ekonomi. Proses tata kelola mencakup aspek kehidupan politik, sosial, dan ekonomi, yang berdampak pada setiap individu, rumah tangga, desa, wilayah, atau negara. Tata kelola melibatkan (1) Negara, yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan politik, hukum, dan ekonomi yang kondusif untuk membangun kemampuan individu dan mendorong inisiatif swasta; (2) masyarakat sipil, yang memfasilitasi mobilisasi opini publik dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, dan (3) pasar, yang diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola mencakup jumlah prosedur, tindakan, dan entitas yang tersedia bagi warga negara (untuk memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai operasi, seperti mengomunikasikan keprihatinan mereka, menerapkan hak-hak mereka, memenuhi kewajiban mereka, dan menengahi perselisihan mereka" (Risteska, et al., 2010).

Selama 15 tahun terakhir, tata kelola telah menjadi konsep utama dalam perdebatan terkait pembangunan internasional. Penilaian tata kelola bervariasi menurut minat, kebutuhan, dan budaya para peneliti. Beberapa berfokus terutama pada korupsi sektor publik; yang lain mengambil pendekatan yang lebih luas, yang dapat mencakup unsur-unsur hak asasi manusia dan demokrasi yang diteliti

di seluruh masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga peradilan, dan pemerintah. Pengalaman menunjukkan bahwa penekanan pada tata kelola sangat penting bagi sistem kesehatan/pendidikan untuk memenuhi fungsi kesehatan publik/pendidikan publik yang esensial. Baik tata kelola kesehatan maupun pendidikan mencakup lembaga dan hubungan antara warga negara, pejabat pemerintah, dan penyedia layanan kesehatan/pendidikan. Idealnya, tata kelola yang baik dalam kesehatan dan pendidikan harus memiliki sifat responsif dan akuntabilitas, transparansi, mencakup keterlibatan warga negara dan kapasitas pelaku negara (pengambil keputusan pemerintah pusat dan daerah) untuk merancang dan menerapkan kebijakan di sektor-sektor ini. (Risteska, at all, 2010)

Tabel 2.1 Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut United Nations Development Programme (UNDP)

Legitimasi dan Suara	Partisipasi; semua pria dan wanita harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara yang sah yang mewakili keinginan mereka. Partisipasi yang luas tersebut dibangun atas dasar kebebasan berserikat dan berbicara, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
Arah	Visi strategis; para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan berjangka panjang tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta pemahaman tentang apa yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Ada pula pemahaman tentang kompleksitas historis, budaya, dan sosial yang menjadi dasar perspektif tersebut.
Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Responsivitas; lembaga dan proses berusaha melayani semua pemangku kepentingan. - Efektivitas dan efisiensi; proses dan lembaga menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan sekaligus memanfaatkan sumber daya secara optimal.
Akuntabilitas	Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik, serta kepada pemangku kepentingan institusional. Akuntabilitas ini berbeda-beda, tergantung pada organisasi dan apakah keputusan tersebut bersifat internal atau eksternal.

Transparansi	Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Proses, lembaga, dan informasi dapat diakses secara langsung oleh mereka yang berkepentingan, dan informasi yang cukup tersedia untuk dipahami dan dipantau.
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan; semua pria dan wanita memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. - Aturan hukum; kerangka hukum harus adil dan ditegakkan secara imparsial, khususnya, hukum tentang hak asasi manusia.

Sumber : UNDP, 2010

Konsep penerapan good governance dalam suatu negara tidak hanya menjadi tradisi atau model pemerintahan yang baru dalam era globalisasi ini saja. Namun makna pemerintahan sebagai suatu bentuk organisasi yang dinamis, dituntut untuk dapat selalu berubah dalam kondisi tertentu. Inilah yang nantinya akan menjadikan konsep good governance sebagai suatu landasan bagi pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara menyeluruh. Terminologi good governance memang belum baku tetapi sudah banyak definisi yang mencoba membedah maknanya. Namun, tidak dapat disangkal lagi bahwa good governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (national prosperity) (Reydonnyzar dan Suwanda, 2019).

2.2 Konsep *Good University Governance* (GUG)

Tata kelola universitas yang baik atau *Good University Governance* (GUG) adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan perguruan tinggi yang mengutamakan transparansi, (akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, dan berkeadilan) sehingga tanggung jawab terhadap masyarakat dapat diukur dengan lebih baik. Evaluasi bagaimana konsep GUG diterapkan dalam manajemen perguruan tinggi dan bagaimana proses pelaksanaannya berlangsung secara efektif (Usman, 2024).

Tata kelola universitas merupakan proses pengelolaan dan pengaturan yang efektif dan efisien atas semua aspek kehidupan universitas, mulai dari kebijakan akademik dan administratif, hingga pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan (Maassen & Cloete (2012) dalam Sudarmanto, Eko, dkk 2024).

Tata kelola universitas yang baik sangat penting dilakukan karena kompleksitas dan strategis universitas dalam masyarakat. Terdapat tiga perhatian khusus dalam pengelolaan perguruan tinggi yang baik, yaitu :

- a. Optimalisasi kinerja akademik, mencakup pengembangan kurikulum yang relevan, fasilitas yang memadai, pengembangan staf akademik (dosen) yang berkualitas.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi dengan pengelolaan sumber daya penelitian dengan efisien, lingkungan akademik yang mendukung kolaborasi dan pertukaran ide, dan kerjasama dengan sektor industri dan lembaga riset lainnya.
- c. Memastikan kepatuhan hukum dan etika, mematuhi peraturan pemerintah, melindungi hak asasi manusia, dan menghindari konflik kepentingan.

Pelaksanaan tata kelola universitas yang baik menganut prinsip-prinsip yang dikembangkan melalui konsensus global oleh berbagai organisasi pendidikan, badan pemerintahan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan lembaga internasional seperti UNESCO, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), UNDP atau World Bank dengan menetapkan indikator yang dirancang untuk memastikan institusi pendidikan tinggi beroperasi secara efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

2.3 Fungsi Prinsip-Prinsip *Good University Governance* (GUG)

Fungsi prinsip-prinsip Tata Kelola Universitas yang Baik (*Good University Governance* (GUG)) berdasarkan sajian Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemdikbud (2014) tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan Transparansi dalam Tata Kelola Akademik
 - Memastikan bahwa kebijakan akademik, pengelolaan keuangan, dan keputusan strategis dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat).
 - Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi civitas akademika dalam pengelolaan perguruan tinggi.
- b. Menjamin Akuntabilitas dalam Pengambilan Keputusan
 - Menuntut setiap pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diambil.
 - Mencegah praktik maladministrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan perguruan tinggi.
- c. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pendidikan
 - Mengoptimalkan sumber daya (SDM, keuangan, sarana-prasarana) untuk mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
 - Mendorong penggunaan teknologi dalam tata kelola akademik dan administratif untuk meningkatkan efisiensi kerja.
- d. Memperkuat Partisipasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
 - Meningkatkan peran serta mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan akademik.
 - Menciptakan lingkungan akademik yang demokratis dan inklusif.
- e. Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Memastikan kebijakan yang diterapkan tidak diskriminatif dan sesuai dengan regulasi pendidikan tinggi yang berlaku.
 - Memberikan perlindungan hukum bagi civitas akademika dalam menjalankan tugas dan haknya.
- f. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Akademik
 - Mendukung pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, penelitian berkualitas, dan publikasi ilmiah.
 - Memperkuat reputasi universitas di tingkat nasional dan internasional melalui akreditasi, kolaborasi global, dan inovasi akademik.
- g. Memastikan Keberlanjutan Institusi Perguruan Tinggi

- Mendorong perencanaan strategis jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan akademik, finansial, dan sosial.
- Mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif seperti kemitraan industri, hibah penelitian, dan unit bisnis universitas.

Prinsip-prinsip *Good University Governance* menjadi pedoman dalam menciptakan tata kelola universitas yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Implementasi yang baik akan membawa dampak positif bagi kinerja akademik, mutu pendidikan, dan daya saing universitas di tingkat global.

2.4 Manajemen dalam Pendidikan

Pengertian manajemen yang dikemukakan Terry (1972) adalah pelaksanaan konsepsi dan pencapaian hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari pemanfaatan bakat dan sumber daya manusia.

Setiawan (2021) menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu upaya pengaturan atau pemanfaatan sumber daya yang dilakukan atas dasar aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk memperoleh hasil sebagai upaya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu mengatur proses kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Karena itu, tidak akan ada organisasi yang akan berhasil secara sukses jika tidak menerapkan manajemen yang baik.

Hariri dkk., (2016) menyatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang berkaitan dengan masalah teknis dan mencakup berbagai persoalan yang rumit sehingga pelaku pendidikan dituntut menguasai manajemen pendidikan yang lebih baik. Pandangan para ahli tentang fungsi-fungsi manajemen menggambarkan kegiatan dalam konteks bisnis, namun secara esensial dapat diterapkan dalam konteks pendidikan.

Wilayah manajemen pendidikan yang dikemukakan Ngalim Purwanto dalam Hariri dkk., (2016) mengelompokkannya dalam tiga bidang:

- a. Administrasi material, yaitu kegiatan yang menyangkut bidang-bidang materi/benda-benda, seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, gedung, dan alat-alat perlengkapan sekolah dan lain-lain.
- b. Administrasi personal, mencakup di dalamnya administrasi personal guru dan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah, juga administrasi murid. Dalam hal ini masalah kepemimpinan dan supervisi atau kepengawasan memegang peranan yang sangat penting.
- c. Administrasi kurikulum, seperti tugas mengajar guru-guru, penyusunan silabus atau rencana pengajaran tahunan, persiapan harian dan mingguan dan sebagainya.

Setiawan (2021) menjabarkan fungsi-fungsi dalam manajemen pada lingkungan pendidikan mencakup:

- a. Perencanaan (*planning*); menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa depan, maka dilakukan perencanaan terhadapnya. Aktivitas dalam perencanaan tersebut dilakukan untuk menentukan tindakan apa yang akan diperbuat, agar mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, dalam merencanakan suatu kegiatan tertentu maka seorang perencana harus terlebih dahulu menetapkan tujuan yang menjadi target capaian dalam kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian setelah itu baru memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang direncanakan tersebut dan yang terakhir adalah melakukan identifikasi sumber yang jumlahnya selalu terbatas, yaitu dengan melihat situasi terkait sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada, sehingga dapat menunjang terlaksananya kegiatan tersebut secara baik.
- b. Pengorganisasian (*organizing*); mengalokasikan tugas dan tanggung jawab kepada tenaga kependidikan. Dengan demikian, pengorganisasian merupakan suatu bentuk kegiatan administratif yang dilakukan untuk menyusun struktur, membentuk hubungan kerja dan menentukan personil-personil yang diberi

tugas ataupun memenang, agar diperoleh suatu keharmonisan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengorganisasian dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menjembatani antara perencanaan dengan pelaksanaan (penggerakan). Perencanaan hanyalah suatu kegiatan yang terbatas pada kerangka kegiatan tanpa adanya subjek dan wewenang yang jelas.

Dengan demikian, perencanaan yang baik apabila tidak didukung oleh pengorganisasian yang baik maka kegiatan tersebut juga tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebab pada dasarnya pengorganisasian merupakan pembagian wewenang dan tugas personil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

- c. Pelaksanaan (*actuating*); mengimplementasikan kebijakan pendidikan dalam proses pembelajaran. *Actuating* adalah aktualisasi dari perencanaan dan pengorganisasian kegiatan secara nyata. Suatu perencanaan dan pengorganisasian tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan manakala tanpa adanya aktualisasi dalam bentuk *actuating* (pelaksanaan/ penggerakan) suatu kegiatan. Jika diibaratkan perencanaan dan pengorganisasian merupakan garis start, sedangkan *actuating* itu merupakan suatu tindakan menuju tujuan yang diinginkan berupa garis finish, tentunya garis finish tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu tindakan (*action*) tersebut. *Actuating* ini merupakan suatu istilah yang dapat dikelompokkan ke dalam istilah lain seperti *commanding*, *directing*, *coordinating*, *leading* dan *motivating*. Dengan demikian, *actuating* merupakan satu diantara fungsi-fungsi manajemen yang berperan untuk merealisasikan hasil dari perencanaan dan pengorganisasian dengan cara mengarahkan atau menggerakkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
- d. Pengawasan (*controlling*); mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. *Controlling* dapat diartikan dengan pengawasan atau pengendalian. *Controlling* dilakukan oleh pimpinan atau manajer dalam memastikan terhadap pelaksanaan suatu program, dengan cara melakukan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan apa yang semestinya terjadi (dilakukan) di lapangan. *Controlling* (pengawasan) dalam

lingkungan persekolahan, dilakukan juga untuk meningkatkan profesionalisme di kalangan guru dan tenaga kependidikan agar proses pembelajaran yang diselenggarakan berlangsung sebagaimana mestinya. *Controlling* ini dalam fungsi manajemen diterapkan agar pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan tidak melenceng dari perencanaan yang telah dibuat, jika ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan ketika pelaksanaan suatu program, maka dengan adanya *controlling* ini maka penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut akan dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan semula. Dengan demikian, *controlling* itu merupakan pengawasan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan, untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai dengan perencanaan yang dibuat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pengawasan dilakukan baik dari segi input, proses, output dan outcome juga, apakah semuanya telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya belum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Reeser (1973) berpendapat bahwa manajemen adalah pemanfaatan sumber daya fisik dan manusia melalui usaha yang terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan. Dalam pendapat ini disadari betul betapa pentingnya peranan sumber daya (*resources*) yang dimiliki organisasi, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material. Karena memanfaatkan kedua sumber daya tersebut oleh manajer dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien akan mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Pemanfaatan sumber daya organisasi tersebut dimulai dari melakukan perencanaan yang tepat, pengorganisasian yang mantap, penyusunan staf yang tepat dan profesional, pengarahan dan pengawasan yang terkendali dengan baik akan menjamin berfungsinya proses manajerial.

Candra dan Rifa'i (2016) memberikan perspektif yang lebih luas tentang manajemen, dengan mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan

efisien. Berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen. Karena itu di dalamnya ada sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu: unsur manusia (*men*), barang-barang (*materials*), mesin (*machines*), metode (*methods*), uang (*money*) dan pasar atau (*market*). Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau memengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien

2.5 Manajemen Publik

Manajemen publik yang mengalami perubahan seiring perubahan zaman dan teknologi serta kebutuhan administrasi. Perubahan manajemen publik yang di dunia dikenal dengan *New Public Management* (NPM) di Indonesia dikenal dengan Reformasi Birokrasi adalah sebuah pendekatan dalam administrasi publik yang muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap kritik terhadap birokrasi tradisional. *New Public Management* menekankan penerapan praktik manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Secara umum, NPM dikenal sebagai manajemen pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (publik) dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

New Public Management (NPM) dapat diterapkan sebagai landasan dalam melakukan reformasi birokrasi dan dikenal sebagai manajerialisme administrasi sektor publik yang berbasis market, organisasi post-birokratik, serta entrepreneurship birokratik. Memberikan perbaikan signifikan di instansi pemerintah, dalam menerapkan efisiensi, efektifitas, serta akuntabilitas (Indrawati dalam Hamid, 2022).

Pemerintah sebagai lembaga regulator dalam pelayanan publik telah menetapkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai perundang undangan bagi

setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya lahir Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pemerintah daerah dituntut untuk melahirkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah, melalui Peraturan Daerah (PERDA).

Beberapa karakteristik utama dalam penerapan reformasi birokrasi di Indonesia adalah :

a. Orientasi pada peningkatan hasil dan kinerja

Fokus pada hasil dan kinerja dibandingkan dengan prosedur dan proses. Kinerja diukur berdasarkan pencapaian tujuan dan hasil yang spesifik. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen kinerja untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan. Mengurangi birokrasi dan meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan proses yang tidak efisien.

b. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Transfer wewenang dan tanggung jawab dari tingkat pusat ke tingkat lokal atau unit kerja yang lebih kecil. Ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas dalam pengambilan keputusan. Dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta mendorong desentralisasi fiskal untuk memungkinkan daerah memiliki sumber pendanaan yang lebih mandiri.

c. Manajemen Berbasis Kinerja

Penggunaan indikator kinerja dan sistem penilaian untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja individu dan organisasi. Insentif dan penghargaan diberikan berdasarkan pencapaian kinerja.

d. Penggunaan Praktik Bisnis Swasta

Penerapan praktik dan teknik manajemen dari sektor swasta seperti manajemen sumber daya manusia yang lebih fleksibel, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, dan penggunaan kontrak serta *outsourcing*.

e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik diorientasikan pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan (warga negara) dengan memberikan pelayanan yang lebih responsif dan berkualitas. Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan menerapkan standar pelayanan minimum dan mekanisme pengaduan yang efektif.

f. Pengurangan Biaya dan Efisiensi

Upaya untuk mengurangi biaya operasional melalui efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengurangan birokrasi, dan peningkatan produktivitas.

g. Akuntabilitas dan Transparansi

Meningkatkan akuntabilitas publik melalui pelaporan kinerja yang transparan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta mengimplementasikan sistem pengawasan dan audit yang lebih ketat untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Akuntabilitas suatu organisasi mengimplikasikan: (1) tersedianya informasi tentang keputusan/kebijaksanaan (*decision*) dan tindakan (*action*) yang diambil selama operasi; (2) meminta pihak eksternal untuk mengkaji informasi tersebut; dan (3) mengambil tindakan koreksi jika dibutuhkan. Hal yang sangat ditekankan di atas adalah pentingnya keterbukaan dalam manajemen organisasi. Hal ini tercermin dari pendapat yang mengatakan bahwa akuntabilitas itu mengimplikasikan tentang arus keluar (*outflow*) dari informasi yang transparan, kemudian mengharapkan adanya kritikan atau opini pihak di

luar organisasi mengenai informasi tersebut, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang dianggap perlu berdasarkan pada hasil telaahan pihak organisasi tersebut (Rasul, 2009).

2.6 Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Fungsi utama BLU adalah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bersifat non-profit dan memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangannya. BLU bisa berada di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, penelitian, dan lain-lain. Mereka memiliki kewenangan khusus untuk mengelola dana yang diterima dari berbagai sumber, baik dari anggaran pemerintah, pendapatan layanan, hibah, dan lainnya.

Secara umum, Badan Layanan Umum (BLU) berperan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Penerapan kebijakan dan program terkait reformasi birokrasi di Indonesia telah diterbitkan landasan hukum yang menjadi pijakan dalam berkegiatan pada BLU diantaranya adalah :

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Menyediakan kerangka kerja dan arah strategis untuk pelaksanaan reformasi birokrasi selama 15 tahun;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengagendakan reformasi birokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional;

- c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah;
- d. Zona Integritas sebagai inisiatif untuk membangun unit kerja di lingkungan pemerintah yang bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik.

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu hasil dari upaya reformasi birokrasi di Indonesia. Pembentukan BLU adalah bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui pendekatan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.

2.7 Kinerja dan Mutu Akademik

Kinerja Akademik mengacu pada capaian atau hasil yang diperoleh dalam aktivitas akademik, baik oleh dosen, mahasiswa, maupun institusi, mencakup produktivitas dalam penelitian, publikasi, tingkat kelulusan, serta prestasi mahasiswa dan tenaga pendidik. Kinerja Akademik berorientasi pada pencapaian kuantitatif dan hasil konkret dalam proses akademik meliputi jumlah publikasi, IPK rata-rata mahasiswa, jumlah mahasiswa lulus tepat waktu, perolehan hibah penelitian, jumlah paten, serta prestasi akademik.

Mutu Akademik lebih menekankan pada standar kualitas pendidikan yang mencerminkan efektivitas sistem akademik dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi. Ini berkaitan dengan akreditasi, relevansi kurikulum, kompetensi lulusan, dan kepuasan pemangku kepentingan. Mutu Akademik lebih bersifat kualitatif, mengukur sejauh mana pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan meliputi akreditasi institusi dan program studi, tingkat kepuasan mahasiswa, kualitas pengajaran, efektivitas sistem pembelajaran, serta pencapaian standar kompetensi lulusan. Proses kegiatan akademik yang efektif dan efisien di perguruan tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah rasio jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen, kualitas pengajaran dan fasilitas yang ada (Kemdikbud, 2019).

Kurniawan dkk., (2016) mengemukakan bahwa. pengukuran tingkat keberhasilan perguruan tinggi membutuhkan adanya indikator kinerja yang jelas. Indikator

kinerja merupakan pencapaian kuantitatif dan/atau kualitatif pada periode waktu tertentu. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara target yang disusun berdasarkan *baseline* tahun sebelumnya dan capaian dari mulai *input*, proses dan *output*, serta *outcome* suatu perguruan tinggi. Indikator kinerja dibuat untuk memudahkan dalam menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan program kerja dalam rangka perbaikan kualitas berkelanjutan.

Indikator kinerja harus merupakan dokumen yang bersifat terbuka, yaitu tidak hanya diketahui pejabat atau internal organisasi saja namun juga perlu diketahui oleh masyarakat, termasuk alumni, orangtua mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan para donatur. Institusi seperti perguruan tinggi negeri harus menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang tidak hanya berisi informasi mengenai mahasiswa yang gagal maupun yang lulus tetapi berbagai data lain yang mencakup langkah-langkah dari prestasi akademik dan tingkat kepuasan mahasiswa. Penilaian indikator kinerja perguruan tinggi ini disesuaikan dengan tuntutan terhadap mutu pendidikan yang terus ditingkatkan sebagai upaya untuk menciptakan output yang berkualitas dan siap terjun ke pasar kerja serta untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Output yang dihasilkan harus berdasarkan suatu proses yang matang dan didukung oleh input yang baik pula.

Untuk menjamin ketercapaian indikator kinerja diperlukan proses penjaminan mutu yang merupakan kegiatan mandiri suatu perguruan tinggi yang disusun, dirancang dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Penjaminan mutu perguruan tinggi harus dimulai dari yang sederhana, diterima secara luas, mudah dioperasikan, efisien, dan menyesuaikan dengan kondisi lokal spesifik.

Khairunisa dkk. (2025) mengemukakan bahwa kinerja merupakan suatu proses dari perilaku yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam satu periode tertentu. Sehingga kinerja dapat diukur baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Terdapat empat dimensi pengukuran kinerja dari perguruan tinggi antara lain sumber daya manusia/staf, mahasiswa, penelitian, dan keuangan. Kinerja sumber daya manusia/staf dapat dilihat dari efektivitas recruitment system, penempatan, pengembangan, retensi,

pemberhentian, sistem monitoring dan evaluasi, kualifikasi akademik, kompetensi dosen, kualifikasi dan upaya peningkatan sumber daya manusia. Selain itu kinerja mahasiswa juga dapat dilihat dari jumlah kelulusan mahasiswa, lama kelulusan mahasiswa, dan jumlah lulusan diserap oleh lapangan kerja. Kinerja penelitian merupakan keseluruhan hasil penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang memberikan dampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan berdasarkan balance scorecard terdiri dari empat dimensi, yaitu kinerja operasi, posisi keuangan, nilai universitas dan tertib keuangan.

2.8 Aspek Penting dalam Teori Manajemen Operasional

2.8.1 Definisi Manajemen Operasional

Manajemen operasional adalah proses pengelolaan aktivitas yang diperlukan untuk menciptakan barang atau jasa. Ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, informasi, serta bahan baku, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Secara teori, manajemen operasional adalah disiplin ilmu yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan aktivitas produksi atau operasi sebuah organisasi. Tujuan utama dari manajemen operasional adalah memaksimalkan efisiensi operasional dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin untuk menghasilkan produk atau jasa berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

2.8.2 Fungsi Utama dalam Manajemen Operasional

- a. Perencanaan; menentukan strategi, tujuan, dan proses yang dibutuhkan untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Perencanaan operasional melibatkan penentuan kapasitas produksi, desain proses, perencanaan lokasi, dan jadwal produksi.
- b. Pengorganisasian; menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien agar setiap elemen dalam operasi bekerja secara optimal. Pengorganisasian ini mencakup pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam rantai produksi.

- c. Pengarahan; mengarahkan tim dan individu agar mereka dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengarahan ini juga mencakup motivasi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- d. Pengendalian; memantau dan mengevaluasi proses produksi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai sesuai dengan rencana. Pengendalian operasional melibatkan identifikasi masalah atau hambatan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

2.8.3 Konsep Utama dalam Manajemen Operasional

a. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang minimal untuk menghasilkan output maksimal, sementara efektivitas berkaitan dengan seberapa baik hasil akhir memenuhi tujuan yang ditetapkan.

b. Produktivitas

Produktivitas adalah rasio output terhadap input. Manajemen operasional berfokus pada peningkatan produktivitas dengan meminimalkan pemborosan dan meningkatkan penggunaan sumber daya.

c. Kualitas

Manajemen operasional juga bertanggung jawab dalam memastikan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar. Metode seperti *Total Quality Management* (TQM) dan *Six Sigma* sering digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kesalahan/kecacatan proses bisnis yang menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan (kualitas dan efisiensi).

d. Pengelolaan Rantai Pasok (*Supply Chain Management*)

Ini adalah pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan antara pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk atau jasa sampai ke konsumen dengan cara yang paling efisien dan menguntungkan.

e. *Lean Manufacturing*

Konsep *lean* berfokus pada pengurangan/penghilangan pemborosan (*waste*) dalam proses produksi, sehingga hanya aktivitas yang memberikan nilai tambah yang dijalankan. Ini melibatkan eliminasi aktivitas yang tidak efisien dan penghematan biaya.

2.8.4 Elemen Kunci dalam Manajemen Operasional

- a. Desain produk dan layanan untuk menentukan spesifikasi produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Desain ini harus mempertimbangkan kebutuhan pelanggan, kemampuan teknologi, serta biaya yang terlibat.
- b. Manajemen kapasitas guna memastikan bahwa organisasi memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa terjadi over produksi atau kekurangan kapasitas.
- c. Manajemen inventaris dalam pengelolaan persediaan barang agar selalu tersedia saat dibutuhkan, tanpa menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi atau kehabisan stok.
- d. Pemilihan teknologi dengan memilih teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasional.

2.8.5 Perkembangan Teori Manajemen Operasional

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis global, teori manajemen operasional juga mengalami perkembangan. Berikut beberapa tren terkini dalam manajemen operasional:

- a. Otomatisasi dan digitalisasi dengan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), menghubungkan perangkat fisik seperti sensor, perangkat elektronik, dan objek lainnya ke jaringan internet (*internet of things*; IoT), dan analisis big data untuk mengotomatisasi proses produksi dan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data;
- b. Keberlanjutan (*sustainability*) dengan fokus pada operasi yang ramah lingkungan dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan;

- c. Penggunaan sistem produksi yang lebih fleksibel dan responsif yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan konsumen melalui teknologi digital.

2.8.6 Pentingnya Manajemen Operasional

Manajemen operasional memiliki dampak langsung pada daya saing suatu organisasi. Dengan mengelola operasi secara efisien, organisasi dapat:

- a. mengurangi biaya produksi;
- b. meningkatkan kualitas produk dan layanan;
- c. meningkatkan kecepatan dalam pengiriman produk ke pasar;
- d. menyesuaikan diri dengan permintaan konsumen yang terus berubah;
- e. meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan.

2.8.7 Manajemen Proses Operasional

Manajemen operasional juga melibatkan pengelolaan proses kerja, termasuk bagaimana alur pekerjaan diatur untuk menghasilkan produk atau layanan.

Beberapa pendekatan dalam manajemen proses operasional antara lain:

- a. *continuous improvement* (Kaizen), yaitu suatu proses perbaikan terus-menerus yang berfokus pada peningkatan efisiensi, kualitas, dan produktivitas;
- b. *just-in-time* (JIT), yaitu pola manajemen produksi yang bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu dan inventaris dengan memproduksi barang hanya saat ada permintaan.

2.8.8 Menyusun atau Menyempurnakan *Standard Operating Procedure* (SOP)

Standard Operating Procedure (SOP) yang diubah menjadi Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintah (POS AP) dibuat dalam rangka penyelarasan proses bisnis dengan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai

amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 untuk mengatur proses operasional dengan lebih efisien.

2.8.9 Mengukur Keberhasilan Dalam Mencapai Tujuan Tata Kelola Yang Baik

Indikator-indikator yang digunakan perguruan tinggi dalam mengadopsi *Good University Governance* (GUG) adalah alat penting untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan tata kelola yang baik. Dalam konteks pendidikan tinggi, baik IKU maupun KPI digunakan untuk mengevaluasi dan memantau berbagai aspek seperti kualitas pendidikan, efisiensi operasional, kepuasan mahasiswa, dan lainnya, yang berhubungan dengan tujuan strategis perguruan tinggi atau institusi pendidikan tersebut.

2.8.9.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja suatu institusi. Dasar penggunaan IKU adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Mengatur perencanaan pembangunan yang harus terukur dan akuntabel, salah satunya melalui penerapan indikator kinerja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan melalui sistem penilaian kinerja berbasis IKU.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja dengan indikator yang terukur sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Mengatur penggunaan IKU sebagai

bagian dari sistem akuntabilitas kinerja untuk menilai ketercapaian sasaran organisasi dan memastikan kinerja yang transparan.

- e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB). Beberapa PermenPAN-RB, seperti PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, memberikan panduan teknis terkait penyusunan IKU, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasinya.

Dasar hukum ini menunjukkan bahwa IKU adalah instrumen penting untuk menilai kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi sebagai alat pengukuran kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk mendorong kualitas pendidikan tinggi, terbagi dalam 8 IKU Perguruan Tinggi, yaitu:

- a. IKU 1. Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak. Persentase lulusan yang bekerja di tempat yang layak, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha dalam waktu 6 bulan setelah lulus.
- b. IKU 2. Mahasiswa Mendapatkan Pengalaman di Luar Kampus. Persentase mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di luar kampus, seperti magang, pertukaran pelajar, penelitian, atau proyek kemanusiaan.
- c. IKU 3. Dosen Berkegiatan di Luar Kampus. Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan profesional di luar kampus, seperti menjadi praktisi industri, mengajar di kampus lain, atau melakukan penelitian kolaboratif.
- d. IKU 4. Praktisi Mengajar di Dalam Kampus. Persentase mata kuliah yang diajarkan oleh praktisi profesional dari industri atau lembaga di luar kampus.
- e. IKU 5. Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional. Jumlah hasil kerja dosen yang dimanfaatkan

masyarakat (termasuk teknologi yang diimplementasikan) atau yang mendapatkan penghargaan internasional.

- f. IKU 6. Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia. Persentase program studi yang memiliki kerja sama dengan mitra industri atau perguruan tinggi berstandar internasional dalam bidang pengajaran, penelitian, atau magang.
- g. IKU 7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif. Persentase mata kuliah yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau berbasis kasus yang melibatkan mahasiswa dalam kolaborasi aktif.
- h. IKU 8. Program Studi Berstandar Internasional. Jumlah program studi yang mendapatkan akreditasi atau sertifikasi internasional dari lembaga yang diakui.

Indikator-indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan, dosen, proses pembelajaran, dan relevansi perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Perguruan tinggi diharapkan terus mengembangkan strategi untuk memenuhi dan meningkatkan capaian IKU ini.

2.8.9.2 Key Performance Indicators (KPI)

Key Performance Indicators (KPI) adalah serangkaian metrik atau indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan kinerja individu, tim, organisasi, atau proyek dalam mencapai tujuan tertentu. KPI adalah alat yang penting dalam manajemen kinerja untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan sejalan dengan visi, misi, dan target yang telah ditentukan, dengan fungsi utama :

- a. Mengukur kinerja, membantu memantau pencapaian kinerja terhadap target yang spesifik, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sudah tercapai.
- b. Mengidentifikasi kesenjangan, sehingga organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki.
- c. Meningkatkan akuntabilitas, membuat individu dan tim lebih bertanggung jawab atas hasil yang dicapai.

- d. Mendukung pengambilan keputusan, sehingga informasi yang dihasilkan KPI membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang berbasis data.
- e. Meningkatkan fokus dan motivasi dengan memberikan arah yang jelas tentang prioritas kerja sehingga membantu tim tetap fokus pada tujuan utama.

Karakteristik KPI yang efektif harus memenuhi kriteria SMART, yaitu:

- a. *Specific* (spesifik), jelas dan terfokus pada hasil tertentu.
- b. *Measurable* (terukur), yaitu dapat diukur dengan data kuantitatif atau kualitatif.
- c. *Achievable* (dapat dicapai), bahwa target yang ditentukan realistis dan dapat dicapai.
- d. *Relevant* (relevan), yaitu sesuai dengan tujuan strategis organisasi atau individu.
- e. *Time-bound* (berbatas waktu), bahwa harus memiliki batas waktu yang jelas untuk pencapaian.

2.8.9.3 Perbedaan IKU dengan KPI

Walaupun KPI sering digunakan sebagai padanan IKU, ada sedikit perbedaan:

- IKU biasanya digunakan dalam konteks pemerintah atau organisasi publik untuk menilai akuntabilitas kinerja.
- KPI lebih umum digunakan di sektor swasta, perusahaan, atau organisasi komersial untuk mengukur keberhasilan terhadap sasaran bisnis.

Dengan menetapkan KPI yang jelas, organisasi dapat memastikan setiap upaya diarahkan untuk mencapai tujuan strategisnya. *Key Performance Indicators* (KPI) yang umum digunakan dalam konteks GUG adalah :

- a. KPI untuk Transparansi
 - Publikasi Laporan Tahunan; jumlah dan kualitas laporan tahunan yang dipublikasikan;

- Akses Informasi Publik; jumlah kunjungan dan akses ke situs web universitas yang menyediakan informasi publik;
- Survei Kepuasan Stakeholder; tingkat kepuasan stakeholder terkait keterbukaan informasi.

b. KPI untuk Akuntabilitas

- Audit Internal dan Eksternal; frekuensi dan hasil audit yang dilakukan;
- Laporan Kinerja Pimpinan; frekuensi dan keterbukaan laporan kinerja yang dipublikasikan;
- Mekanisme Keluhan dan Penyelesaian; jumlah keluhan yang diterima dan diselesaikan secara efektif.

c. KPI untuk Partisipasi

- Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan; jumlah rapat dan komite yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan staf;
- Survei Kepuasan Partisipasi; tingkat kepuasan stakeholder terhadap partisipasi dalam pengambilan keputusan;
- Jumlah Inisiatif atau Program Partisipatif; inisiatif atau program yang melibatkan berbagai stakeholder dalam proses universitas.

d. KPI untuk Responsibilitas

- Program Pengabdian Masyarakat; jumlah dan dampak program pengabdian masyarakat yang dijalankan;
- Kebijakan Lingkungan dan Sosial; implementasi dan evaluasi kebijakan lingkungan dan sosial;
- Laporan Dampak Sosial; laporan tentang kontribusi universitas terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

e. KPI untuk Keadilan dan Kesetaraan

- Kesetaraan Gender dan Inklusi; data statistik tentang keberagaman gender dan inklusi di universitas;
- Survei Kepuasan Keadilan dan Inklusi; tingkat kepuasan terhadap keadilan dan inklusi;
- Kebijakan Anti-Diskriminasi; implementasi dan evaluasi kebijakan anti-diskriminasi.

f. KPI untuk Efisiensi dan Efektivitas

- Tingkat Kelulusan; persentase mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu;
- Waktu Penyelesaian Studi; rata-rata waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan program studi;
- Employability Lulusan; persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan sesuai bidang studi dalam jangka waktu tertentu setelah lulus;
- Analisis Biaya-Manfaat: Evaluasi penggunaan sumber daya.

g. KPI untuk Kepemimpinan yang Etis

- Kepatuhan terhadap Kode Etik; jumlah kasus pelanggaran etika;
- Pelatihan Etika dan Integritas; jumlah dan frekuensi pelatihan tentang etika dan integritas yang diadakan;
- Mekanisme Pelaporan Etika; efektivitas mekanisme pelaporan dan penanganan kasus pelanggaran etika.

2.9 Penelitian Kualitatif Deskriptif

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG) diimplementasikan dalam manajemen pendidikan dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kinerja akademik di FMIPA Universitas Lampung. Pendekatan

kualitatif deskriptif dilakukan karena hasil dari penelitian dideskripsikan berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh (Ali & Asrori, 2022).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam hal ini, penelitian deskriptif merupakan akumulasi data dasar dalam cara deskriptif yang semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian ini bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dalam mencangkup metode-metode deskriptif (Suryabrata, 2008).

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa peneliti pada penelitian kualitatif berperan sebagai *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. sedangkan menurut Moleong (2017) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan, karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Berdasarkan pendapat tersebut, untuk mendapatkan data peneliti terjun langsung dan membaur dalam komunikasi subyek penelitian untuk memahami langsung kenyataan di lapangan. Karena dengan terjun langsung ke lapangan maka peneliti dapat melihat secara langsung fenomena di lapangan.

2.9.1 Sumber Data

Moleong (2017) menyatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Informasi yang telah didapat, kemudian dilakukan pengolahan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data sebelumnya dan mencari bila diperlukan (Sugiyono, 2013).

2.9.2 Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data sebelumnya dan mencari bila diperlukan (Sugiyono, 2013).

Reduksi data juga dilaksanakan dengan melakukan proses penyederhanaan data mentah agar lebih terfokus dan sistematis. Hanya informasi yang relevan dengan GUG, manajemen pendidikan, dan kinerja akademik yang dipertahankan.

2.9.3 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Huberman (2014) berpendapat bahwa penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyajian data dilaksanakan dengan menampilkan data dalam format yang mudah dibaca dan dianalisis. Bisa berupa kutipan wawancara, grafik lingkaran, matriks hubungan antar tema, atau ringkasan naratif.

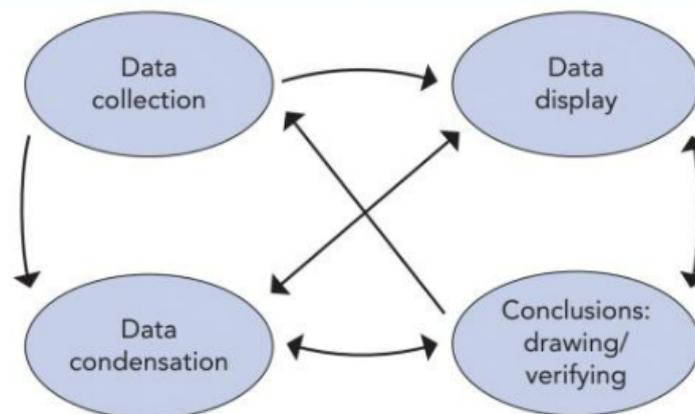
2.8.4 Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Dengan demikian

dalam upaya melakukan tahap penyimpulan dan verifikasi data yang absah dan dapat dipercaya, tergantung pada tahap reduksi, dan pemaparan data yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga data analisis peneliti sangat diperlukan dalam menggunakan pendekatan kualitatif (Gunawan, 2013).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, data dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2013).

Menyimpulkan makna dari data yang telah dianalisis, lalu diverifikasi melalui triangulasi (sumber/metode), diskusi tim, dan konfirmasi ke informan (*member check*).



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif

Sumber :Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Analisis Data Kualitatif: (edisi ke-2). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (Hal.14)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Setting Penelitian

3.1.1 Lokasi dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Universitas Lampung pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng, Bandar Lampung

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan FMIPA Universitas Lampung untuk kurun waktu Tahun Akademik 2023/2024 s.d. 2024/2025.

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian

Rancangan studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena GUG secara holistik dan kontekstual. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek yang terkait dengan tata kelola universitas, mulai dari kebijakan, pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap berbagai elemen akademik. Pendekatan holistik ini penting agar hubungan antara berbagai komponen sistem dapat dipahami secara utuh.

Selain itu, pendekatan ini juga bersifat kontekstual, karena difokuskan pada implementasi GUG dalam konteks lingkungan FMIPA Universitas Lampung. Setiap institusi memiliki karakteristik, kebijakan, dan dinamika organisasi yang berbeda. Oleh karena itu, memahami penerapan GUG di FMIPA memerlukan

pemahaman terhadap kondisi lokal yang memengaruhi proses tata kelola pendidikan, seperti budaya kerja, struktur birokrasi, serta kebijakan dan tantangan internal yang dihadapi fakultas. Dengan rancangan seperti ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai realitas implementasi GUG di lingkungan akademik FMIPA Universitas Lampung.

3.3 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sebagai instrumen sebaiknya mempersiapkan diri untuk memiliki pemahaman dan penguasaan terhadap metode kualitatif dan bidang yang diteliti, serta memiliki kesiapan untuk memasuki lapangan agar memperoleh hasil penelitian yang valid yang bertujuan agar peneliti dapat melihat dan mengikuti kegiatan subyek penelitian secara langsung dengan tetap berlandaskan pada prinsip atau kode etik tertentu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

3.4.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki peran strategis dalam implementasi *Good University Governance* (GUG) di FMIPA Universitas Lampung, yaitu Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Koordinator Bagian Tata Usaha, dan Koordinator Sub Bagian Akademik. Para informan ini dipilih secara *purposive* karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam manajemen pendidikan serta pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lingkungan fakultas.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Sumber data	Jumlah
1.	Dekan	1
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama	1
3.	Koordinator Bagian Tata Usaha	1
4.	Koordinator Sub Bagian Akademik	1
	Jumlah	4

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan arsip yang relevan, seperti peraturan akademik, pedoman pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, laporan kinerja tahunan fakultas, hasil audit akademik, serta dokumen kebijakan dan evaluasi program kerja yang mendukung pemahaman mengenai konteks penerapan GUG. Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis, melakukan triangulasi, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kondisi manajemen pendidikan dan kinerja akademik di FMIPA Universitas Lampung.

Teknik pengumpulan data dan pengkodeannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kode Penelitian

No	Teknik Pengumpulan Data	Kode	Sumber Data	Kode
1.	Wawancara	W	Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik Koordinator Bagian Tata Usaha Koor. Sub Bagian Akademik	D WDAk KBTU KSb.Ak.
2	Observasi	O	Wakil Dekan Bidang Akademik Koordinator Bagian Tata Usaha Koor. Sub Bagian Akademik	WDAk KBTU KSb.Ak.
3	Dokumentasi	D	Koordinator Bagian Tata Usaha Koor. Sub Bagian Akademik	KBTU KSb.Ak.

Kode penelitian tersebut diaplikasikan dalam deskripsi wawancara dengan cara sebagai berikut :

(W.D. 10.03.2025)	
W	: Wawancara pada teknik pengumpulan data
D	: Dekan sebagai sumber data
10.03.2025	: Waktu pelaksanaan pada tanggal 10 Maret 2025

Pemberian kode dalam teknik pengumpulan data berfungsi untuk mengorganisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi data secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif ini, pemberian kode dilakukan terhadap hasil wawancara mendalam guna memudahkan proses identifikasi tema, pola, dan kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Kode digunakan untuk menyederhanakan narasi panjang menjadi satuan informasi yang bermakna dan dapat dibandingkan antar-informan. Fungsi utama dari pemberian kode adalah untuk memastikan bahwa proses analisis data berjalan secara objektif dan transparan, serta mendukung validitas temuan. Dengan adanya sistem kode, peneliti dapat melakukan pelacakan terhadap pernyataan informan sesuai kategori tertentu, seperti prinsip-prinsip *Good University Governance* (transparansi, akuntabilitas, partisipasi), efektivitas manajemen pendidikan, dan dampak terhadap kinerja akademik. Proses ini juga memudahkan dalam menyusun laporan hasil penelitian yang terstruktur dan berlandaskan data yang telah dianalisis secara sistematis.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

3.4.2.1 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi mendalam dari para informan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan akademik di FMIPA Universitas Lampung. Teknik ini dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian terkait implementasi *Good University Governance* (GUG) dalam manajemen pendidikan. Informan dalam penelitian ini meliputi Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Koordinator Bagian Tata Usaha, dan Koordinator Sub Bagian Akademik. Wawancara bertujuan menggali pemahaman, pandangan, pengalaman, serta praktik konkret yang diterapkan dalam konteks tata kelola akademik dan dampaknya terhadap kinerja akademik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Proses wawancara direkam dan ditranskrip untuk keperluan analisis lebih lanjut melalui teknik koding tematik.

Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, serta mengacu pada prinsip-prinsip GUG (transparansi, akuntabilitas, partisipasi,

efektivitas, efisiensi, keadilan, dan tanggung jawab) sebagai berikut:

- a. Pertanyaan disusun berdasarkan fokus penelitian, seperti: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi dalam manajemen pendidikan.
- b. Menggunakan pertanyaan semi-terstruktur agar tetap fleksibel sesuai alur pembicaraan.
- c. Disesuaikan dengan profil dan jabatan narasumber, misalnya: Dekan, Wakil Dekan, Koordinator TU, dan Koordinator Sub Bagian Akademik.
- d. Menghindari pertanyaan tertutup, dan mengutamakan eksplorasi mendalam.
- e. Berorientasi pada penggalian pengalaman, persepsi, dan strategi yang diterapkan oleh narasumber terkait GUG dan kinerja akademik.
- f. Memastikan etika penelitian, termasuk *informed consent* dan kerahasiaan identitas jika diperlukan.

Pedoman ini berupa panduan pertanyaan terbuka (semi-terstruktur) yang disesuaikan dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing informan, namun tetap mempertahankan kerangka pertanyaan inti yang sama agar data dapat dibandingkan dan dianalisis secara tematik. Pedoman ini disusun berdasarkan teori GUG, manajemen pendidikan tinggi, dan referensi dari buku metodologi penelitian kualitatif.

3.4.2.2 Observasi

Observasi dilakukan untuk melengkapi data hasil wawancara, dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan aktivitas akademik dan tata kelola pendidikan di lingkungan FMIPA Universitas Lampung. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, melainkan mencatat fenomena yang relevan, seperti interaksi antar unsur pimpinan dan staf akademik, pola pelayanan administrasi akademik, serta pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip GUG, seperti transparansi dan akuntabilitas. Observasi ini memberikan gambaran empiris dan kontekstual yang memperkuat validitas data hasil wawancara, serta menegaskan bagaimana prinsip-prinsip GUG diimplementasikan dalam praktik nyata.

Pedoman observasi disusun untuk memandu peneliti dalam mencermati aktivitas dan interaksi yang relevan dengan implementasi GUG di lingkungan akademik FMIPA sebagai berikut:

- a. Mengamati perilaku, aktivitas, dan interaksi nyata di lingkungan akademik (misalnya, dalam pelayanan administrasi atau pelaksanaan kegiatan akademik).
- b. Mencatat bentuk penerapan prinsip GUG secara langsung, seperti transparansi layanan, akses informasi akademik, keterlibatan sivitas akademika, dan pola komunikasi.
- c. Mengkaji lingkungan fisik dan budaya organisasi (misalnya poster informasi, SOP layanan, atau nuansa kebijakan digital).
- d. Observasi dilakukan secara non-partisipatif dan naturalistik, tanpa mengintervensi kegiatan.

Pedoman ini meliputi indikator yang ingin diamati, seperti keterbukaan informasi akademik, alur pelayanan administrasi, praktik pengambilan keputusan, dan dinamika komunikasi antar unsur fakultas. Formatnya berupa lembar observasi terbuka yang memungkinkan peneliti mencatat data deskriptif secara naturalistik, sesuai dengan pendekatan observasi non-partisipatif. Pedoman ini disesuaikan dengan karakteristik lapangan dan berlandaskan teori *governance* dan budaya organisasi.

3.4.2.3 Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan, pedoman, laporan, dan arsip akademik.

Dokumen-dokumen yang dikaji meliputi dokumen rencana strategis (Renstra), standar operasional prosedur (SOP) akademik, laporan evaluasi akademik, serta kebijakan internal fakultas yang menunjukkan penerapan prinsip GUG. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang objektif dan terstruktur guna mendukung hasil wawancara dan observasi. Studi dokumen membantu peneliti dalam menelusuri konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan manajemen pendidikan serta dampaknya terhadap pencapaian kinerja akademik.

Pedoman studi dokumen digunakan untuk menyeleksi dan mengkaji dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan kebijakan dan pelaksanaan akademik, sebagai berikut:

- a. menyeleksi dokumen-dokumen resmi dan relevan, seperti: rencana strategis fakultas; Standar Operasional Prosedur (SOP) akademik; Laporan Kinerja Akademik; Notulen Rapat Akademik; SK Dekan/Rektor terkait tata kelola.
- b. menganalisis konten dokumen untuk menemukan nilai-nilai GUG yang tercermin.
- c. memverifikasi keakuratan dan keaslian dokumen (otentisitas, kredibilitas).
- d. mencocokkan isi dokumen dengan data hasil wawancara dan observasi (triangulasi).
- e. menggunakan format review dokumen untuk mencatat temuan dan relevansi.

Tabel 3.3 Pedoman Studi Dokumen

No	Dokumen	Ada (√)	Tidak Ada (√)
1.	Profil fakultas		
2.	Visi, misi dan tujuan		
3.	Struktur organisasi		
4.	Data Karyawan a. Data Dosen b. Data Tenaga Kependidikan		
5.	Data sarana dan prasarana a. Ruang Administrasi b. Ruang Laboratorium c. Ruang Kuliah d. Ruang Terbuka		
6.	Dokumen kurikulum		
7.	Dokumen Akreditasi		

Dokumen yang ditelaah dipilih berdasarkan kriteria otentisitas, kredibilitas, representatif, dan relevansi terhadap prinsip GUG. Pedoman ini memuat daftar dokumen yang dibutuhkan (Renstra, SOP, laporan evaluasi akademik, laporan kinerja, dll.) serta aspek yang ingin dikaji dari tiap dokumen, misalnya: sejauh mana dokumen tersebut mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pendidikan.

3.5 Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga langkah utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana implementasi prinsip *Good University Governance* (GUG) diterapkan dalam manajemen pendidikan dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja akademik di FMIPA Universitas Lampung.

3.5.1 Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti menyaring informasi yang relevan dengan fokus dan subfokus penelitian, seperti aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dampaknya terhadap pengelolaan pendidikan dan kinerja akademik. Data yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian disisihkan, sehingga analisis dapat berjalan secara fokus dan sistematis.

3.5.2 Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk naratif dan matriks tematik untuk memudahkan pemahaman terhadap informasi yang dikumpulkan. Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan pola-pola, hubungan antar kategori, serta kecenderungan yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data ini membantu peneliti untuk mengevaluasi keterkaitan antara implementasi GUG dan manajemen pendidikan secara menyeluruh.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal ditarik berdasarkan pola, tema, dan kecenderungan yang muncul dari penyajian data. Selanjutnya, verifikasi dilakukan secara berkelanjutan melalui

triangulasi sumber data dan teknik, diskusi dengan informan kunci, serta pencocokan dengan data dokumentasi. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan terus dikembangkan hingga diperoleh pemahaman yang utuh, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis memiliki tingkat kebenaran, kredibilitas, dan keandalan yang tinggi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai metode utama dalam menguji keabsahan data. Triangulasi dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, seperti Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Koordinator Bagian Tata Usaha, dan Koordinator Sub Bagian Akademik. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh dan objektif. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi jawaban dan informasi. Selain triangulasi, validasi data juga dilakukan melalui pemeriksaan teman sejawat (peer debriefing), dan member check, yaitu dengan mengonfirmasi kembali data atau temuan kepada informan agar diperoleh interpretasi yang sesuai dengan realitas di lapangan. Dengan pendekatan ini, keabsahan data dapat dipertahankan dan hasil penelitian menjadi dapat dipercaya serta layak dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penerapan Prinsip GUG dalam Pengelolaan Akademik

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Penerapan Good University Governance (GUG) Dalam Manajemen Pendidikan Pada Kinerja Akademik Di FMIPA Universitas Lampung”, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prinsip Transparansi dalam manajemen pendidikan di FMIPA Universitas Lampung diwujudkan melalui keterbukaan informasi akademik yang dapat diakses oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Hal ini meliputi ketersediaan informasi kurikulum, jadwal kuliah, evaluasi pembelajaran, serta sistem administrasi akademik berbasis digital yang membantu mengurangi kesenjangan informasi. Transparansi ini memberikan dampak positif terhadap kepercayaan sivitas akademika dan mempermudah proses pengambilan keputusan yang berbasis data.
- b. Prinsip Akuntabilitas terimplementasi melalui mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh elemen organisasi akademik, mulai dari pimpinan fakultas hingga staf administrasi. Setiap kebijakan dan program pendidikan dilaporkan secara berkala dan dievaluasi kinerjanya berdasarkan indikator yang terukur. Penerapan akuntabilitas ini mendorong peningkatan integritas kelembagaan dan memperkuat tata kelola akademik yang profesional dan dapat dipercaya.
- c. Prinsip Partisipatif tercermin dalam keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program akademik.

Forum-forum diskusi, musyawarah fakultas, dan survei kepuasan menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi dan masukan. Prinsip ini menjadikan manajemen pendidikan lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan akademik yang dinamis.

- d. Prinsip Efisiensi dalam pengelolaan akademik diupayakan melalui optimalisasi penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi informasi. Digitalisasi layanan akademik, pemangkasan proses birokrasi, serta penyederhanaan alur administrasi menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi. Hasilnya, layanan akademik menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan mampu mengurangi beban administratif yang tidak perlu.
- e. Prinsip Efektivitas dicapai melalui pencapaian tujuan akademik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. FMIPA Universitas Lampung telah menunjukkan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi; pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dengan indikator kinerja yang terukur dan pelaporan yang sistematis. Efektivitas ini memperkuat kontribusi fakultas dalam pengembangan kualitas pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
- f. Prinsip Keadilan diwujudkan dalam pemberian hak, kewajiban, serta akses layanan akademik yang merata bagi seluruh sivitas akademika tanpa diskriminasi. Sistem seleksi, evaluasi, dan penghargaan dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi dan objektivitas. Upaya keadilan ini meningkatkan motivasi, memperkuat semangat inklusivitas, serta menciptakan iklim akademik yang sehat dan berkeadaban.

5.1.2 Efektivitas Manajemen Pendidikan di FMIPA Unila

Manajemen pendidikan di FMIPA Universitas Lampung telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi melalui perencanaan akademik yang sistematis, pelaksanaan program pendidikan yang terorganisir, serta evaluasi yang berkesinambungan. Efektivitas ini tercermin dalam peningkatan mutu layanan akademik, kepatuhan terhadap jadwal akademik, dan ketercapaian indikator kinerja akademik di tingkat fakultas. Penggunaan sistem informasi akademik, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang terstruktur, serta

pembagian tugas yang jelas antar unit kerja turut mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efisien dan tepat sasaran.

5.1.3 Dampak terhadap Kinerja Akademik di FMIPA Unila

Penerapan prinsip-prinsip Good University Governance berdampak positif terhadap peningkatan kinerja akademik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Dosen mengalami peningkatan dalam produktivitas tridarma, mahasiswa memperoleh akses layanan akademik yang lebih berkualitas dan transparan, sementara tenaga kependidikan menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi akademik. Kinerja akademik meningkat secara menyeluruh baik dari segi pencapaian publikasi ilmiah, pelaksanaan pembelajaran, maupun pelayanan akademik. Implementasi GUG mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam lingkungan akademik.

5.1.4 Tantangan dalam Penerapan GUG

Meskipun penerapan GUG telah berjalan, penelitian ini menemukan sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi tata kelola akademik. Tantangan utama meliputi resistensi terhadap perubahan dari sebagian elemen sivitas akademika, keterbatasan sarana dan prasarana digital pendukung manajemen pendidikan, serta kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip GUG. Selain itu, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat budaya organisasi yang menjunjung nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap proses akademik.

5.1.5 Strategi Peningkatan Penerapan GUG

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat implementasi GUG, dibutuhkan strategi yang berkelanjutan. Strategi tersebut antara lain meliputi peningkatan kapasitas dan kompetensi pimpinan serta staf akademik dalam manajemen berbasis GUG, penguatan sistem informasi akademik yang terintegrasi dan mudah diakses, serta pembudayaan nilai-nilai tata kelola yang baik melalui pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi berkala. Selain itu, dibutuhkan

komitmen kelembagaan dalam merancang kebijakan yang berpihak pada prinsip-prinsip GUG secara konsisten, guna menciptakan lingkungan akademik yang adil, efektif, dan akuntabel.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip GUG secara menyeluruh dan konsisten menjadi pondasi penting dalam memperkuat manajemen pendidikan dan meningkatkan kinerja akademik di lingkungan FMIPA Universitas Lampung.

5.2 Saran

Secara keseluruhan, penerapan GUG dalam manajemen pendidikan tinggi di FMIPA Universitas Lampung telah menunjukkan hasil yang positif, tetapi masih terdapat ruang untuk perbaikan. Implementasi strategi yang lebih terarah dan dukungan dari seluruh sivitas akademika akan menjadi kunci keberlanjutan tata kelola akademik yang lebih baik di masa depan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, berikut beberapa saran untuk peningkatan implementasi GUG di FMIPA Universitas Lampung:

- a. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi Akademik di FMIPA Universitas perlu terus mengembangkan sistem informasi akademik yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan transparansi dalam tata kelola akademik.
- b. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di FMIPA Unila dilakukan dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kependidikan dan akademik agar dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan tata kelola berbasis GUG.
- c. Evaluasi Berkala terhadap Kebijakan Akademik Universitas perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan akademik dan tata kelola pendidikan guna menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan standar internasional.
- d. Peningkatan keterlibatan atau partisipasi aktif dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam kebijakan akademik perlu ditingkatkan guna menciptakan lingkungan akademik yang lebih kolaboratif dan inovatif.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan FMIPA Universitas Lampung dapat terus mengembangkan tata kelola akademiknya secara lebih baik dan mencapai standar universitas yang unggul serta berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Asrori, M. (2022). Metodologi dan aplikasi riset pendidikan. Bumi Aksara.
- Barneett, Ronald (1992). *Improving Higher Education, Total Quality Care*. SRHE and Open University Press. Buckingham, England. 236 halaman
- Biro Akademik dan Kemahasiswaan (2020). *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung (Edisi Revisi ke-5)*. <https://bak.unila.ac.id> Diakses pada tanggal 11 Agustus 2024 jam 09:38
- Departemen Pendidikan Nasional (2004). Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (*Higher Education Long Term Strategy (HELTS)*) 2003 – 2010 Menuju Sinergi Kebijakan Nasional, Jakarta.
- Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemdikbud (2014). Good University Governance. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/statuta/latih/2014/03GoodUniversityGovernance.pdf> Diakses pada tanggal September 2024
- Gunawan (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. *Bumi Aksara*. 305 halaman.
- Hamid, Hendrawati (2022). Implementasi New Public Management (NPM) Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. *Pallangga Praja IPDN Kampus Sulawesi Selatan*. Vol. 4:2 (117-123) <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3064>
- Hariri, Hasan dkk (2016). Manajemen Pendidikan. Media Akademi. Yogyakarta. xiv + 184 halaman.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khairunisa dkk. (2025). Good University Governance dan Kinerja Perguruan Tinggi. *Journal of Student Research*. 3 (1). 154:167. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3535>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Analisis data kualitatif: Buku Sumber Metode (edisi ke-2). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Moenek, Reydonnyzar dan H. Dadang Suwanda (2019). *Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 229 halaman.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet. Ke-13, h, 111.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), halaman 538-553.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16276>
- Risteska, at all. (2010) Good Governance In Education. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org>.
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/MKD/00049939_Good%20governance%20in%20Education%20-%20English%20_final%20corrected.pdf Diakses pada tanggal 6 Agustus 2024
- Sagala, S. (2013). Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan: pembuka ruang kreativitas, inovasi dan pemberdayaan potensi sekolah dalam sistem otonomi sekolah.
- Setiawan H.R. (2021). Manajemen Peserta Didik. (Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan). UMSU Press. 212 Halaman.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Tyo_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&ots=EV-qHGG0mI&sig=AVFChAkuduh5PIQYH_TrnvCVTB0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (diakses pada 16 Februari 2025)
- Slamet, S. (2014). Implementasi Konsep dan Prinsip Good University Governance pada Perguruan Tinggi Dalam rangka Mewujudkan Good Governance University.
- Slamet, S., Hasan, I., & Lestari, Y. O. (2014). Penilaian Good University Governance pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum: Studi di Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum di Kota Malang.
- Siswanto, Ely (2014). Good University Governance: Prinsip Dan Implementasi Dalam Penggalan Pendapatan.
<https://books.google.co.id/books?id=nX8oDwAAQBAJ&lpg=PA1&ots=M4qipxWZWL&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false> Diakses pada tanggal September 2024

- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung. Cetakan ke-19. 346 halaman.
- Setiawan, Guntur (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Sudarmanto, Eko, dkk (2024). *Good University Governance*. Edited by Marzuki, Ismail, and Basuki Basuki, Cetakan 1, Minhaj Pustaka, 144 halaman <https://doi.org/10.62083/ctwb3m54>
- Suryabrata, S. (2008). *Metodologi penelitian/sumadi suryabrata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Thalib, S. B. (2018, March). *Evaluasi Kinerja Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar*. In *Neutrino* (Vol. 1, No. 1, pp. 17-23).
- Terry, George Robert (1972). *Principles of Management*. Publisher Homewood, Ill., R.D. Irwin. 672 halaman
- Trenggono, Nanang (2024). *Memahami Slogan Unila Be Strong!* <https://www.unila.ac.id/memahami-slogan-unila-be-strong/> Diakses pada Februari 2025)
- Usman (2024). *Implementasi Manajemen Modern dalam Mewujudkan Good University Governance*. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*. Vol. 5 No. 1 80:92 <https://doi.org/10.51805/jmbk.v5i1.189>
- Presiden Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Mahkamah Agung.
- Wijaya, Candra dan Muhammad Rifa'i (2016). *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Perdana Publishing. <http://repository.uinsu.ac.id/2836/1/Dasar-Dasar%20Manajemen.pdf> Diakses pada tanggal Agustus 2024.